

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat Tolotang merupakan kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan. Masyarakat ini memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat dan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu unsur penting dalam struktur sosial masyarakat adat Tolotang adalah keberadaan "Uwa." Uwa dalam masyarakat Tolotang memiliki peran yang sangat vital dan dihormati, yang tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin adat yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam membentuk preferensi pemilih dalam konteks politik lokal.

Masyarakat Tolotang memiliki struktur sosial yang dipengaruhi oleh sistem keagamaan dan adat istiadat. Uwa merupakan tokoh adat dan pemimpin spiritual yang memiliki kewibawaan dan dihormati oleh masyarakat. Kedudukan Uwa tidak hanya sebagai pemimpin ritual keagamaan, tetapi juga sebagai penasihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Sebagai pemimpin spiritual, Uwa memiliki otoritas moral yang tinggi. Nasihat dan pandangan yang disampaikan oleh Uwa dianggap sebagai panduan yang penting bagi masyarakat Tolotang. Hal ini berakar pada keyakinan bahwa Uwa memiliki kedekatan dengan leluhur dan kekuatan spiritual yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam proses pemilihan, rekomendasi dan arahan dari Uwa sering kali dianggap sebagai petunjuk yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Dalam masyarakat adat Tolotang, sistem patronase sangat kuat. Uwa memainkan peran sentral sebagai patron yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat. Sebagai imbalannya, masyarakat menunjukkan loyalitas kepada Uwa. Dalam konteks politik, hal ini diterjemahkan menjadi dukungan terhadap kandidat atau partai yang direkomendasikan oleh Uwa. Pendidikan politik di masyarakat Tolotang banyak dilakukan melalui proses informal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan acara-acara adat. Uwa sering kali menggunakan forum-forum adat untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Dalam acara-acara ini, Uwa dapat menyampaikan pentingnya partisipasi politik dan memberikan panduan tentang kandidat yang dianggap terbaik untuk kepentingan masyarakat. Uwa memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Dalam pemilihan umum, keputusan tentang kandidat yang didukung sering kali merupakan hasil dari musyawarah yang dipimpin oleh Uwa. Proses ini memastikan bahwa preferensi pemilih tidak hanya didasarkan pada pertimbangan individual, tetapi juga pada kesepakatan kolektif yang dipandu oleh nilai-nilai adat. Preferensi pemilih yang dibentuk oleh pengaruh Uwa tidak hanya mempengaruhi hasil pemilihan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya

masyarakat Tolotang. Dengan mengikuti arahan Uwa, masyarakat merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai dan tradisi leluhur, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas dan kesatuan komunitas.

Dalam konteks pemilihan umum, peran Uwa sangat strategis. Mereka sering berperan sebagai penentu arah dukungan politik masyarakat. Pengaruh Uwa bisa terlihat dalam berbagai tahap proses pemilihan, mulai dari sosialisasi calon, kampanye, hingga pemungutan suara. Uwa sering kali memberikan pengarahannya tentang calon-calon yang dianggap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat Tolotang. Preferensi pemilih yang dipengaruhi oleh Uwa juga mencerminkan upaya untuk menjaga solidaritas dan persatuan komunitas. Dengan mengikuti arahan Uwa, masyarakat Tolotang merasa lebih terjamin akan stabilitas dan keberlanjutan dukungan sosial serta politik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Ini penting dalam mempertahankan posisi tawar komunitas di tengah dinamika politik yang lebih luas.

Partisipasi politik rakyat dalam pemilu memberikan pemahaman mengenai perilaku politik. Pengertian perilaku politik sendiri adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. **(Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1999)** Setiap individu dalam masyarakat, memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat kondisi masyarakat heterogen, dan bervariasi. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Terdapat pula kelompok-kelompok kategorial dalam masyarakat, seperti jenis kelamin, perbedaan usia, pendidikan, pekerjaan, ras dan etnis. Hal-hal ini mempengaruhi perilaku memilih seseorang pada momen pemilu nantinya baik Pileg, Pilpres maupun Pemilu. Sebab hal-hal yang melatarbelakangi ini akan berimplikasi pada bangunan pengetahuan dan preferensi kemudian. Perilaku memilih tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan hal lain, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang menyangkut lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya.

Beberapa pertanyaan pokok dalam studi perilaku memilih, termaksud pemilih di Indonesia, pertama, berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai politik atau calon legislatif atau calon presiden: partai apa atau calon mana yang dipilih seorang pemilih dalam pemilu, mengapa dia memilih partai atau calon tersebut dan mengapa tidak memilih partai atau calon yang lain? Kedua, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu: seberapa banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam pemilu? Mengapa seseorang memutuskan untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilu?

Penjelasan-penjelasan teoritis tentang perilaku memilih didasarkan pada beberapa model atau pendekatan yaitu Pertama, Model sosiologis atau yang juga dikenal sebagai *Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior)*. Para penganut model sosiologis yakin bahwa seseorang memilih partai atau calon legislatif tertentu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik partai atau calon.

Kemudian dalam penentuan pilihan politik masyarakat Adat Tolotang diserahkan seluruhnya kepada Uwa'. Apapun dan siapapun yang didukung dan dipilih oleh Uwa' itulah juga yang menjadi pilihan masyarakat Adat Tolotang. Hal tersebut yang membuat Uwa' sering kali

menjadi perebutan calon kepala daerah atau calon legislatif di kabupaten Sidrap. Hal ini menjadi menarik karena dengan melihat kondisi masyarakat Adat Tolotang yang sangat terbuka dengan perkembangan zaman, serta dengan perkembangan globalisasi saat ini, yang memungkinkan setiap orang untuk mengetahui berbagai hal yang dikehendaki, akan tetapi masyarakat dengan mudah dimobilisasi oleh peran Uwa'. Hal yang menarik juga terlihat pada kemampuan masyarakat Adat Tolotang dalam mempertahankan kebudayaan yang mereka anut hingga saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam sejauh mana peran Uwa dalam membentuk preferensi memilih masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang alasan masyarakat adat tolotang dalam ikut serta menentukan pilihan dalam komunitas ini, kita dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk menjaga keberlangsungan budaya dan struktur sosial masyarakat adat Tolotang.

Berangkat dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Peran Uwa Dalam Membentuk Preferensi Pemilih Di Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi Uwa Dalam Komunitas Adat Masyarakat Tolotang di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana bentuk dan upaya uwa dalam mempengaruhi preferensi memilih masyarakat adat tolotang pada pemilihan umum di kabupaten sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah, penelitian ini bertujuan:

- a. Melihat posisi sosial uwa dalam legitimasi dan kharismatik tradisonal
- b. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan uwa dalam mengarahkan pemilihan.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam konteks politik.

1.4.1 Manfaat akademik

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian budaya politik, masyarakat adat tolotang
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat proses penguasaan

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami bagaimana penguasaan dibentuk melalui pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan.
- b. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar megister ilmu politik pada universitas hasanuddin.

Penjelasan Studi tentang permasalahan preferensi kelompok masyarakat adat tolong, maka diperlukan pendekatan teoritis yang tepat agar penulis mampu menguraikan dan memahami realitas atau temuan penelitian untuk mengkonfirmasi teori perilaku memilih yang telah ada yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional. Oleh karena itu, secara garis besar menggunakan teori-teori dan konsep yang dianggap relevan dengan tema penelitian ini.

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 Konsepsi Komunitas

Solidaritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat atau perasaan solider, sifat satu rasa senasib, perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok setiap anggotanya wajib memilikinya. Durkheim memandang masyarakat tradisional maupun masyarakat modern sekalipun tidak memiliki perbedaan dalam hal struktur internal maupun fungsi eksternal, masyarakat tersebut dapat dicirikan oleh berbagai jenis solidaritas kelompok yang ada, baik solidaritas mekanik maupun solidaritas organik. (Anwar, 2013, p. Anwar)

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang rata-rata terlihat pada warga masyarakat yang sama dan memperlihatkan suatu totalitas dalam hal kepercayaan, kebudayaan dan sentimen bersama. Sedangkan solidaritas organik terdapat pada masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang lebih kompleks dan menuntut untuk saling berhubungan dan saling tergantung sedemikian hingga. Solidaritas tersebut wajib dimiliki oleh setiap kelompok sosial. Ferdinand Tonnies ((Soyomukti, 2013):),

Solidaritas dalam kelompok sosial terbagi menjadi dua yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Tonnies, misalnya menggambarkan *gemeinschaft of life* dalam ikatan pernikahan. *Gemeinschaft* (Paguyuban) dibedakan menjadi tiga jenis yaitu *gemeinschaft by blood*, mengacu pada ikatan kekerabatan atau pertalian darah, *gemeinschaft of place*, pada dasarnya merupakan ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal serta tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu dengan yang lain, dan mengacu pada kehidupan bersama di daerah pedesaan, masih berlakunya dan melekatnya sifat saling tolong-menolong. Yang ketiga adalah *gemeinschaft of mind*, mengacu pada hubungan persahabatan, yang disebabkan oleh persamaan keahlian atau pekerjaan serta pandangan yang mendorong orang untuk saling berhubungan secara teratur. (Soyomukti, 2013:).

Sebaliknya, *gesellschaft* (patembayan), (Soyomukti, 2013:) menurut Tonnies, *Gesellschaft* digambarkan sebagai kehidupan publik. Sebagai orang yang kebetulan hidup bersama, tetapi masing-masing tetap mandiri. *Gesellschaft* memiliki sifat hanya sementara dan semu. Menurut Tonnies perbedaan yang terdapat pada kedua kelompok tersebut adalah bahwa dalam *gemeinschaft*, individu tetap bersatu meskipun terdapat berbagai faktor yang memisahkan mereka,

sedangkan dalam *gesellschaft*, individu pada dasarnya terpisah, walaupun banyak faktor pemersatu. Tonnies mengemukakan bahwa *gemeinschaft* ditandai oleh kehidupan yang organis, sedangkan *gesellschaft* ditandai oleh struktur mekanis.

Solidaritas sosial tersebut harus dimiliki oleh setiap kelompok sosial. Kelompok sosial menurut *Joseph S. Roucek* meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. (Soyomukti, 2013:) apapun bentuknya, kelompok sosial terdiri dari orang-orang yang memiliki kesadaran keanggotaan yang sama yang didasarkan pada pengalaman, loyalitas, dan kepentingan yang sama. Unsur-unsur dari perasaan komunitas (*community sentiment*) menurut Soekanto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Seperasaan
- b. Sepenanggungan
- c. Saling memerlukan

Menurut *Brehm dan Kassin (1993)*, prasangka sosial adalah perasaan negatif terhadap seseorang sematamata berdasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Ciri prasangka sosial menurut *Brigham (1991)* dapat dilihat dari dua kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia menjadi dua kelompok, yaitu "kelompok kita" (*in group*) dan "kelompok mereka" (*out group*). *In group* adalah kelompok sosial dimana individu merasa dirinya memiliki atau dimiliki (kelompok kami) sedangkan *out group* adalah grup di luar grup sendiri (kelompok mereka).

Gemeinschaft dalam bahasa Inggris disebut *communal society* atau masyarakat komunal. Dalam bahasa Indonesia disebut paguyuban. *Gemeinschaft* adalah asosiasi sosial di mana individu-individu cenderung ke arah komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu mereka. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Biasanya paguyuban lahir dari dalam diri individu ditandai dengan rasa solidaritas dan identitas yang sama. Keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Kesamaan individu merupakan faktor penguat hubungan sosial, yang kemudian diperkuat dengan hubungan emosional serta interaksi antar individu. Di pedesaan, masyarakat tani yang melambangkan *Gemeinschaft*, hubungan pribadi didefinisikan dan diatur berdasarkan aturan sosial tradisional. Orang-orang memiliki hubungan tatap muka yang sederhana dan langsung satu sama lain yang ditentukan oleh *Wesenwille* (kehendak alami), sebagai emosi alami dan spontan serta ekspresi sentimen.

Konsepsi sosiologi dari Ferdinand Tonnies (Soyomukti, 2013:) yang menyatakan bahwa kelompok sosial terbagi menjadi dua yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Komunitas masuk dalam kategori *Gemeinschaft* yang dalam pengertiannya merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. *Gemeinschaft* juga merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat dalam hubungan batin yang bersifat alamiah dan bersifat kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan persatuan batin yang juga bersifat nyata dan organis. Di dalam *gemeinschaft* terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), kemudian terdapat suatu pengertian (*understanding*) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok

tersebut. Dikatakan demikian karena para anggota komunitas masih dalam lingkup satu desa, lingkungan tetangga, sahabat-sahabat dekat bahkan dari anggotanya ada yang masih saudara. Para anggota komunitas dipersatukan dan disemangati dalam perilaku sosial mereka oleh ikatan persaudaraan, simpati dan perasaan lainnya sehingga mereka terlibat secara psikis dalam suka duka hidup bersama. Dengan kata lain bahwa para anggota komunitas.

Jika dilihat dari hasil penelitian termasuk dalam tipe *gemeinschaft of place* dapat dikatakan demikian karena para anggota komunitas tinggal dan tumbuh pada lingkup yang sama. Dengan persamaan daerah tempat tinggal tersebut, para anggota akan lebih sering dan intim dalam berkomunikasi juga lebih sering berkegiatan bersama.

1.5.2 Konsepsi Politik Identitas

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiikan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994. **(Ubed, Abdilah S. 2002. Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang) :** Indonesiatara Identitas menurut *Jeffrey Week* adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat *Jeffrey Week* tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas **(Widayanti, 2009)**

Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non- fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*) **(Setyaningrum)(Setyaningrum, Arie. 2005. Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik)**

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas". Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda

(categories of difference) *(.)*(**Poskolonial. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005 .**) Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris , politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus dalam kebudayaan masyarakatnya. Menurut **Castells (Indonesia.)**(**S. A. Buchari. 2014. Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.**) politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seseorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu yang merupakan proses dialog internal dan interaksi sosial. Kristianus (**Ibid**) mengemukakan bahwa politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis Maupun agama. Perjuangan politik identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran, baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi.

Politik identitas berbeda dengan nasionalisme, dalam lingkup bangsa, kehadiran politik identitas menciptakan tekanan-tekanan dari kaum reduksionis, sehingga dapat memperlemah identifikasi individu sebagai anggota dari suatu bangsa, sebagai contoh seseorang merasa dirinya sebagai anggota kelompok dari minat yang sama terlebih dahulu dan berikutnya baru memperhatikan kebutuhan Negara dan masyarakat yang lebih luas. Calhoun dan Castell (**Ibid**) menyebutkan sebagaimana makna yang dikandung dalam istilah politik, maka politik identitas esensinya adalah upaya mencapai kekuasaan tertentu dalam kehidupan dan panggung politik, dimana pengakuan keberadaan wakil-wakil dari kelompok etnis merupakan bagian penting dari perjuangan politik yang dilakukan demi kepentingan kelompok etnisnya.

Merujuk pada beberapa pendapat diatas politik identitas adalah aliran politik yang ingin melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, seperti suku, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasinya untuk bersama-sama memperjuangkan kekuasaan tertentu dalam kehidupan dan panggung politik.

1.5.3 Konsepsi Perilaku Memilih

Untuk mengetahui preferensi memilih masyarakat etnis Tolotang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih tersebut dalam pemilihan umum pada tahun 2024, maka penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih. Teori perilaku memilih dengan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikologis dan Pendekatan Pilihan Rasional.

Kegiatan memilih dalam pemilihan umum sebenarnya merupakan kegiatan mengambil keputusan. Keputusan pertama yang harus diambil oleh warga Negara yang berhak memilih ialah apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak. Keputusan lain yang perlu diambil oleh warga Negara yang mempunyai hak pilih ialah partai atau calon manakah yang akan dipilih (**Surabaya**)(**Ramlan Surbakti. 1996. Hasil Pemilu 1992 Dalam Prespektif Strukturasi. Universitas Airlangga. Surabaya**)

Yang menarik untuk dipertanyakan ialah apakah pilihannya itu dibuat berdasarkan pertimbangan sendiri (otonom), ataukah karena dimobilisasi ataukah karena dipaksa (intimidasi). Yang pertama merupakan pilihan yang dibuat sendiri dengan atau tanpa berdiskusi dengan pihak lain. Pesan-pesan yang diterima dari pihak lain semata-mata bersifat informative. Yang kedua merupakan pilihan yang dibuat karena disuruh oleh pemimpin yang disegani, dalam hal ini penyampai pesan lebih penting dari pesan-pesannya. Dan yang terakhir merupakan pilihan yang diambil karena diancam oleh pihak lain baik secara halus maupun secara kasar. Pada pilihan seperti ini, konsekuensi tidak mengikuti pesan jauh lebih penting daripada pesan dan penyampai pesan (**Ibid**)

Studi perilaku memilih, adalah studi yang penting dalam kajian demokrasi liberal, karena perilaku memilih berkaikan dengan partisipasi warga Negara dalam suatu kehidupan politik, dalam menentukan dan mengambil keputusan-keputusan politik. Studi ini merupakan bagian dari sub kajian ilmu politik yang lahir dari perkembangan pendekatan behavioral dalam ilmu politik pada tahun 50-an. Yang menjadi inti studi ini adalah bagaimana para pemilih menentukan pilihannya atau sampai pada keputusan, untuk memilih partai A atau partai B, Kandidat X atau kandidat Y dan seterusnya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Definisi perilaku memilih :

Sebagai studi yang menggelitu kebiasaan dan kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilu serta latar belakang mereka dalam melakukan pilihan (Jack C. Plano) Keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan memilih atau tidak memilih dalam pemilu (**Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1999**) Perilaku memilih dapat digambarkan dalam dua dimensi yaitu Preference (preferensi) dan activity (aktivitas) (Huge A Bone, Austin Ranney (**McGraw-Hill**))

Di Indonesia, studi tentang perilaku memilih menjadi menarik pada era reformasi, karena setiap individu maupun kelompok bebas menentukan pilihan. Dengan keterbukaan dan kebebasan ini, maka akan beragam pula alasan dan pertimbangan yang mendasari pilihan tersebut. Dalam menentukan pilihan individu atau kelompok sangat bergantung pada latar belakang subjek. Latar belakang dapat berupa pendidikan, komunitas tertentu, status sosial, pekerjaan, suku bangsa dan lain-lain. Selain latar belakang yang berbasiskan pada keadaan sosial, faktor kedekatan atau emosional juga turut memengaruhi dalam proses penentuan sikap politik seseorang. Faktor yang ketiga menekankan pada perhitungan untung-rugi dalam menentukan sikap

Penjelasan-penjelasan teoritis tentang voting behavior didasarkan pada beberapa model atau pendekatan yaitu pertama, Sociological model dan kedua, adalah Psihological model serta yang ketiga adalah Rational Voter Model (**Sociological model adalah yang juga dikenal dengan model structural**) . Di lingkungan ilmuan amerika serikat model pertama disebut sebagai mazhab Columbia (*The Columbia School Of Electoral Behavior*). Model kedua disebut Mazhab Michigan (*The Michigan Survei Research Centre*). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor- faktor

sosiologis dalam membentuk perilaku seseorang, sementara mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.

a. Faktor Sosiologis

Dalam sociological model (model sosiologis) untuk memahami perilaku pemilih, melihat perilaku berkaitan erat dengan latar belakang sosial seseorang. Latar belakang sosial yang dimaksud dapat berupa latar belakang demografi, sosial ekonomi, agama dan pendidikan (**Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1999**)

Ramlan surbakti (**Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1999**) dalam penelitiannya mengatakan dalam pendekatan ini realitas perilaku memilih bukan merupakan realitas pembuatan keputusan politik secara individu melainkan sebagai suatu realitas kelompok. Keputusan para pemilih lebih tepat dilukiskan sebagai keputusan kelompok atau dipengaruhi oleh subkultur (*cultural tastes*) dan atribut sosial dari pada pilihan politik individu. Kesadaran politik individu terbentuk berdasarkan pengalaman sosial. Karena perbedaan-perbedaan sosial ini, para warga masyarakat yang menjadi anggota kelompok yang sama cenderung melihat adanya kesamaan-kesamaan kepentingan, aspirasi, nilai-nilai dan perhatian atas kebijakan publik diantara mereka. Menurut *Lipset*, kesadaran kelompok seperti ini merupakan kondisi bagi terbentuknya dan terpeliharanya pembelahan politik (*political cleavaeges*) (**Ibid**)

Menurut Lazarfeld (**Efriza. 2012. Political Explore**) dalam pendekatan ini, Bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya

Menurut *Huge A. Bone dan Austin Ranney* lebih mempertajam latar belakang sosial kedalam tiga kategori. (**McGraw-Hill**) Pertama, *categoric-group memberships*, dalam kategorisasi ini ada berbagai macam karakteristik, misalnya pendidikan, jenis kelamin dan kelompok umur. Meskipun kelompok karakteristik tersebut tidak secara langsung berafiliasi dengan organisasi politik tertentu, akan tetapi perilaku politik mereka sangat ditentukan oleh reaksi kelompok karakteristik terhadap berbagai macam isu yang terkait dengan mereka. Reaksi atas isu tersebut tergantung pada peristiwa politik, misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas pajak untuk kelompok usia 60 tahun, maka perilaku politik mereka pasti akan mendukung partai pemerintah.

Kedua, *secondary group*, kelompok ini jauh berbeda dengan kelompok yang pertama, karena mereka menyadari identitas kelompoknya dan memiliki tujuan tersendiri dalam rangka mempertahankan tujuan kelompok. Dengan kesadaran akan identitas dan tujuan kelompok, maka *secondary group* yang terdiri dari status sosial ekonomi atau kelas sosial, kelompok pekerjaan dan etnis, menjadi kekuatan politik tersendiri yang dapat dimobilisasi.

Dengan kesadaran akan identitas, maka kelompok ini mudah untuk dimobilisasi dukungannya, karena kelompok ini dapat menghasilkan kedekatan secara psikologis dengan memperkuat identifikasi individu atas kelompok, sehingga mereka sadar bahwa mereka adalah etnis tertentu, anggota buruh dan lain-lain. Keterlibatan secara langsung dan tidak langsung pemimpin kelompok, akan mempengaruhi dukungan mereka karena pertimbangan loyalitas atas kelompok.

Ketiga, *primary groups*, kelompok ini terdiri dari orang-orang yang intens bertemu dan berinteraksi setiap hari, misalnya suami dengan istri, anak dengan orang tua dan teman-teman. Pengaruh kelompok ini dalam menentukan perilaku pemilih seseorang sangatlah berarti, misalnya berdasarkan studi perilaku pemilih ditahun 1950-an oleh Angus Campbell dan kawan-kawan, bahwa 90 sampai 95 persen pasangan suami-istri memiliki preferensi yang sama atau rata-rata anak yang memiliki hak memiliki mempunyai pilihan yang sama dengan orang tuanya.

Para penganut model sosiologis yakin bahwa seorang pemilih memilih partai atau calon legislatif tertentu karena kesamaan karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik partai atau calon. Pertama, seorang pemilih dengan latar belakang kelas sosial bawah (dilihat dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan) cenderung akan memilih partai politik atau calon legislatif yang dipandang memperjuangkan perbaikan kelas sosial mereka. Contoh klasik di amerika dari pertarungan yang berbau kelas ini adalah platform partai demokrat yang lebih menekankan masalah kesejahteraan sosial. Sebaliknya, partai republik secara tradisional menekankan prinsip-prinsip pasar bebas yang menghendaki seminim mungkin keterlibatan pemerintah di sektor sosial ekonomi.

Dimasa pasca orde-baru, politik kepartaian berbasis kelas sosial tidak begitu jelas. Sebagai bukti dari 48 partai politik yang bersaing dalam pemilu 1999, tak satupun partai politik yang secara eksplisit punya platform yang lebih mencerminkan kepentingan kelas atas. **(Saiful Mujani, 2011)** Demikian juga dalam kepartaian 2004. Ada 24 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, dilihat dari platform ekonomi mereka, hampir semua sama, yakni mengedepankan agenda pemerintahan yang kuat secara ekonomi. Karena platform ekonomi partai-partai di Indonesia relatif sama, yakni menekankan pemihakan kepada kelas sosial menengah-bawah, maka kekuatan-kekuatan politik yang bersaing cenderung monolitik. Dan karena itu faktor kelas sosial kemungkinan tidak terlalu penting dalam pemilu di indonesia (Ibid)

Kedua, Faktor sosiologis lain yang dipercaya penting mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih partai politik atau calon legislatif adalah agama. Partai politik atau calon yang punya platform keagamaan yang sama dengan karakteristik keberagamaan pemilih, cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Seorang muslim cenderung untuk memilih partai ber-platform islam dibanding dengan partai berplatform agama lain. Dalam politik kepartaian di Indonesia, agama adalah faktor yang dipercaya sangat penting mempengaruhi perilaku pemilih. Pada tahun 1950-an, cukup banyak partai politik dibangun atas dasar solidaritas dan sentiment keagamaan.

Ketiga, Ras dan etnis juga dipercaya sebagai faktor sosiologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih partai atau calon legislatif. Partai yang secara tradisional memperjuangkan kesetaraan ras dan etnis cenderung didukung oleh kelompok-kelompok ras dan etnis minoritas karena kelompok inilah yang berkepentingan langsung dengan isu tersebut. Secara lebih khusus, kesamaan ras dan etnik antara pemilih dan calon cenderung mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Hal lain terkait etnis adalah sentimen kedaerahan. Calon legislatif yang punya asal-usul atau keterkaitan dengan daerah tertentu cenderung akan didukung oleh pemilih di daerah tersebut. Jadi, menurut pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dari luar melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses sosialisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya.

Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi memilih masyarakat adat tototang dalam pemilihan umum 2024, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bone Austin Raney bahwa mereka yang menyadari identitas kelompoknya dan memiliki tujuan tersendiri dalam rangka mempertahankan tujuan kelompok, yang terdiri dari status sosial ekonomi atau kelas sosial, kelompok pekerjaan dan etnis, menjadi kekuatan politik tersendiri yang dapat dimobilisasi, dalam konteks daerah Kab sidrap kecamatan tellu limpoae kelurahan amparita, misalnya. Kekuatan etnis ini dapat menjadi kekuatan politik tersendiri dan bisa digerakan dalam menentukan pilihan politik karena kesadaran akan identitas mereka.

b. Faktor Psikologis

Psychological model (model psikologis) yang ditekankan dalam model ini adalah perilaku pemilih ditentukan dari kedekatan emosional, misalnya dalam bentuk dukungan pada partai dan kandidat tertentu yang didasarkan atas faktor emosional atau kedekatan, bukan faktor lain. Menurut pendekatan ini, kelas sosial, etnis, agama dalam model sosiologis tidak menggambarkan kelompok sosial (sosial group) karena bersifat abstrak. Oleh karena identifikasi pemilih terhadap partai lebih disebabkan feeling atau hubungan emosional.

Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, Gurin dan Miller (**Efriza. 2012. Political Explore**) Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga ilmuwan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterima, maka besar kemungkinan calon tersebut dipilih.

Aliran psikologi menemukan konsep baru dan orisinal dalam studi perilaku memilih, yakni konsep "identifikasi diri dengan partai politik" (party identification) atau sering disingkat "party id". Ia merupakan konsep sentral dalam model psikologis. Adalah fakta bahwa setiap orang mempunyai identitas atau beragam identitas sosial seperti agama, ras dan etnis. Itu terjadi di tingkat sosial. Di tingkat politik, menurut aliran ini percaya bahwa kebanyakan orang mengidentikan diri dengan partai politik tertentu.

Konsep "identifikasi" disini secara umum diartikan sebagai "orientasi afeksi individu terhadap kelompok penting dalam masyarakat". Orientasi afeksi merupakan sikap atau perasaan seseorang terhadap partai politik, bisa positif dan bisa juga negatif. Sikap positif itu, misalnya mengidentikan diri dengan sebuah partai politik tertentu, dan sikap negatif berarti tidak mengidentikkan atau bahkan anti terhadap partai politik yang lain. Sikap positif ini dalam bentuk indentifikasi diri seseorang dengan partai politik sedemikian sehingga sebuah partai menjadi identitas politiknya.

Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal, membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah- masalah publik dalam keluarga, tempat kerja dan lingkungan masyarakat dimana seseorang tinggal akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik. Dalam lingkungan keluarga dimana partai politik disikapi secara positif, tumbuh sikap positif pula terhadap partai politik tersebut; juga terhadap tokoh atau isu yang terkait dengan partai tersebut. Orang tua pendukung partai politik tertentu cenderung menumbuhkan sikap partisan pada anggota keluarga lain sesuai dengan sikap partisansya.

Proses sosialisasi yang kita dapatkan dari sejak kecil hingga dewasa pada intinya mengajarkan tentang proses identifikasi partai, yang kemudian dalam proses sosialisasi tersebut kita mendapatkan informasi tentang hal-hal yang dikemukakan oleh Liddel (**Saiful Mujani, 2011**)

Pertama, Calon / kandidat. Masyarakat dalam menentukan pilihannya mendasarkan pertimbangannya pada proses identifikasi antara apa yang di ingini oleh dirinya dengan sosok personal kandidat atau calon legislatif, artinya pemilih cenderung melihat apakah calon legislatif tersebut memilih karakter yang disukai oleh masyarakat.

Kedua, Platform partai. Masyarakat dalam memilih akan melakukan proses identifikasi antara harapan-harapan yang ada dalam dirinya dengan apa yang partai tawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu saja yang ditawarkan adalah platform partai tersebut.

Ketiga, tokoh partai. Dimana setiap partai memiliki tokoh yang dianggap telah berjasa dalam pembangunan partai dan juga peran karyanya dalam melakukan pembangunan masyarakat, informasi tentang tokoh inilah yang akan didapatkan masyarakat yang kemudian menjadikan tokoh ini sebagai idola atau panutan dalam masyarakat.

Konsep identitas partai dalam studi pemilih di amerika muncul untuk menjawab pertanyaan mengapa dukungan terhadap partai politik diamerika relatif stabil. Hanya sedikit orang

yang tadinya memilih partai republik kemudian berpindah memilih partai demokrat dalam pemilu berikutnya, atau sebaliknya. Identitas partai menjawab mengapa stabilitas pilihan politik itu terjadi. Bagaimana identitas partai diukur dalam studi-studi perilaku memilih? Pengukuran paling awal yang digunakan untuk konsep identitas partai di Amerika bersifat unidimensional, apakah seorang pemilih menganggap dirinya seorang republikan atau seorang demokrat. Kalau seorang republikan atau demokrat, maka pertanyaan berikutnya adalah seberapa kuat perasaan anda sebagai orang republik atau demokrat. Pengukuran semacam ini mengandaikan adanya sistem kepartaian yang sederhana, yakni hanya dua partai politik utama seperti di Amerika dan Inggris. Modifikasi harus dilakukan dalam sistem kepartaian yang lebih kompleks seperti di Jerman, Belanda, Italy dan Indonesia. (Ibid)

Dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi memilih masyarakat etnis tolotang dalam pemilu serentak pada tahun 2024 penelitian ini hanya menggunakan identifikasi sejauh mana peran uwa sebagai variable. Menurut Campbell tetap memiliki pengaruh terhadap pemilih yang fanatik dan memiliki tingkat loyalitas ideologis yang tinggi terhadap pemimpinya (uwa). (Depdagri, 1999) Identifikasi uwa yang juga memiliki korelasi yang sangat kuat dalam pilihan pemilih sebagai mana temuan Jhon Kassel pada pemilu di Amerika (**Kessel, 1980**) dan Kadek Dwita Apriani pada pilukada di Tabanan-Bali (**Apriani, 2012**)

c. Pilihan Rasional

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang kosong. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas keinginan dalang. Mereka beranggapan bahwa perilaku memilih bukanlah keputusan yang dibuat saat menjelang atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya oleh lapisan sosial tempat ia berada. Penggunaan pendekatan pilihan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku memilihpun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional yaitu memberikan suara kepada partai atau calon legislatif yang dianggap menekankan kerugian yang sekecil-kecilnya dan juga memilih alternatif yang menimbulkan resiko terkecil. Dengan demikian para pemilih diasumsikan memiliki kemampuan untuk menilai partai politik maupun calon legislatif dengan melihat segala informasi yang ada.

Menurut Antony Down (**Efriza, 2012. Political Explore**) Pendekatan ini bertumpu pada keyakinan bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang punya kepentingan untuk dirinya secara material. Perilakunya didorong oleh motif kepentingan material dirinya. Atas dasar itu perilaku politik seorang pemilih, termasuk pilihan politik, didorong oleh kepentingan ekonomi pemilih. Setidaknya motif ekonomi adalah motif yang paling utama dibandingkan dengan motif-motif yang lain. Pendeknya ada keyakinan bahwa pemilih menghitung, mempunyai kalkulasi untung-rugi dalam menentukan pilihan-pilihan tersebut. Seorang pemilih akan memilih partai atau calon legislatif bila dengan memilih calon itu sang pemilih merasakan hal itu menguntungkan atau

memenuhi keinginan pemilih sendiri. Sebaliknya, ia tidak memilih calon tersebut bila dinilai merugikannya.

Terkait dengan itu, rasionalitas pemilih bertautan dengan isu yang dirasakan paling mendesak atau paling penting bagi pemilih. Ketika berbicara tentang isu, secara umum ada dua jenis jenis isu: isu simbolik atau identitas dan isu teknis. Isu simbolik berkaitan dengan identitas kelompok sosial yang maknanya instrinsik bukan instrumental dan hanya bermakna bagi kelompok bersangkutan. Ia tidak berlaku bagi kelompok diluarnya dan karena itu tidak bermakna bagi semua warga.

Sementara isu-isu teknis yang utama adalah isu-isu yang berkaitan dengan berbagai masalah yang berlaku bagi semua warga terlepas dari kelompok-kelompok identitas sosial dan budayanya. Isu-isu ini bersifat rasional serta dapat dipertukarkan atau bersifat transaksional. Misalnya isu yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok, semua warga membutuhkan kebutuhan pokok lepas dari latar belakang identitas sosial dan budaya.

Hubungan isu-isu dan penilaian kandidat dengan perilaku memilih akan tampak lebih jelas dengan melihat hasil penelitian pomper di Amerika Serikat. Dengan membandingkan tiga hasil penelitiannya pada pemilu 1954, 1964, 1972, pomper mengajukan tiga kesimpulan; pertama, hubungan antara variabel sosial ekonomi dengan sikap memilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu dan turun sampai pada tingkat terendah pada 1972. Faktor-faktor demografis ketika dihubungkan dengan sikap memilih juga mengalami hal yang sama. Kedua, posisi isu-isu politik dalam menentukan voting meningkat secara tajam, baik dampaknya secara langsung terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak langsung. Ketiga, terjadi penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih secara terus-menerus mulai dari pemilu 1956, 1964 dan sampai pada puncaknya pada pemilu 1972. **(Saiful Mujani W. L.-o.)**

Menurut Niemi dan Wiesberg **(Asfar) (Asfar M. , 2006)** Model ini ingin menjelaskan bahwa pada pendekatan - pendekatan sebelumnya terkesan menihilkan kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap orang. Hal tersebut terbukti dari adanya realitas bahwa adanya varian perilaku memilih yang memiliki identitas sosial yang sama, hal tersebut dinilai tidak dapat dijelaskan oleh dua pendekatan sebelumnya

Secara demikian, perilaku memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (maximum gained) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit. Tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (least risk), yang penting mendahulukan selamat.³³ Dengan begitu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan. Begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi dibidang masing-masing seperti seni, olah raga, film, organisasi, politik, dan sebagainya.

Him Melweit dan koleganya menyebutkan sebagai "Consumer Model" of party choice, bahwa perilaku memilih merupakan pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan lain. Mereka mencatat bahwa "same express hope that the voters, loosened from traditional partisan attachment, will be able to exercise more rational choice based on the thoughtful consideration of the issues" (**Ibid**)

Sedangkan Richard R. Lau dan David P. Redlawsk (**Richard R. Lau dan David P. Redlawsk dalam Ali Sahab. 2009. (Tesis) PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA BOJONEGORO (studi hubungan antara identifikasipartai)**) menilai bahwa seseorang memutuskan untuk memilih salah satu pasangan calon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu model Rational Choice, Early Socialization And Cognitive Consistency, Fast And Frugal Decision Making, Bounded Rationality Ang Institutive Dcision Making.

Rational choice, diadopsi dari ilmu ekonomi dimana masyarakat berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal dengan meminimalisir biaya sehingga dalam aplikasi politik masyarakat akan memilih kandidat yang akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak akan memilih kandidat yang dirasa tidak memberikan keuntungan. Pemilih rasional untuk memutuskan pilihannya kepada kandidat sebelumnya mencari informasi yang berkaitan dengan kandidat. Informasi tentang kandidat dalam hal ini seperti visi dan misi serta program.

Early Socialization And Cognitive Consistency, pemilih mendasarkan pilihannya pada sosialisasi awal yang didapatnya. Sosialisasi awal ini biasanya didapatkan dari identifikasi partai pemilih. Dengan identifikasi partai pemilih bisa memberikan pilihannya pada kandidat. Teori ini menganggap bahwa pemberitaan media masa sarat dengan tujuan pencitraan dan pemberitaan media bisa membiaskan sosialisasi awal yang didapat pemilih dari identifikasi partai. Setelah pemilih mendapatkan identifikasi partai selanjutnya pemilih melihat isu-isu yang ditawarkan kandidat, persepsi terhadap kandidat, ras, gender, evaluasi ekonomi, dan evaluasi kepemimpinan Incumbent dan ini semua terekam dalam Cognitive Consistency.

Fast And Frugal Decision Making, Model ini menggambarkan bahwa seseorang dalam mengambil keputusan mencari secara aktif informasi tentang kandidat tapi hanya yang dianggap baik atau peduli dengan pemilih (individu) dan mengabaikan lainnya. Jadi pemilih hanya memilih kepada kandidat yang menawarkan isu yang berkaitan dengan pemilih itu sendiri.

Bounded Rationality Ang Institutive Dcision Making. Model ini menjelaskan bahwa seseorang akan memilih kandidat yang partainya akan melindungi atau memberikan keuntungan pada pemilih. Seperti PKS yang dinilai oleh sebagian orang adalah partai garis keras walaupun bersih dan mencoba menjadi inklusif. Masyarakat Indonesia lebih suka memilih partai yang tidak terlalu ketat dengan ideologi agama dan lebih senang memilih partai yang nasionalis. Jadi stereotip masyarakat terhadap suatu partai atau kandidat yang dijadikan pertimbangan memilih Untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat etnis Tolotang dalam pemilihan umum 2024, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Antony Downs, bahwa

perilaku memilih merupakan perhitungan untung rugi, Seorang pemilih akan memilih partai atau calon legislatif bila dengan memilih calon itu sang pemilih merasakan hal itu menguntungkan atau memenuhi keinginan pemilih sendiri. Sebaliknya, ia tidak memilih calon tersebut bila dinilai merugikan. Menurut Niemi dan Weisberg, pemilih adalah makhluk ekonomi, ia akan memiliki kecenderungan untuk memilih yang paling dapat memberikan keuntungan bagi dirinya secara materi. Dalam konteks penelitian ini kemudian diturunkan menjadi dua variabel yakni Program yang ditawarkan partai atau calon serta Pemberian uang oleh partai atau calon (Money Politic).

1.6 teori kekuasaan Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu adalah salah satu sosiolog dan filsuf Perancis paling berpengaruh pada abad ke-20 yang mengembangkan teori kekuasaan dalam kerangka relasi sosial, habitus, dan modal. Berbeda dengan pandangan klasik tentang kekuasaan yang menitikberatkan pada dominasi langsung dan struktural (seperti kekuasaan negara, hukum, atau militer), Bourdieu justru menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja secara simbolik, tersembunyi, dan seringkali tidak disadari oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Dalam perspektif Bourdieu, kekuasaan dibangun dan dijalankan melalui akumulasi serta konversi berbagai bentuk modal. Tiga modal utama yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan relasi kekuasaan adalah modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.

1. Modal Sosial (Social Capital)

Modal sosial menurut Bourdieu adalah sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui relasi sosial, jaringan, dan keanggotaan dalam komunitas tertentu. Modal ini tidak hanya mencerminkan siapa yang kita kenal, tetapi juga seberapa kuat dan bermanfaat jaringan tersebut dalam menopang posisi sosial kita. "Modal sosial adalah akumulasi sumber daya yang dapat dimobilisasi melalui hubungan sosial yang bersifat institusional atau informal" (Bourdieu, 1986).

Dalam praktik kekuasaan, aktor yang memiliki jaringan sosial luas dan berpengaruh—baik melalui hubungan kekeluargaan, keagamaan, maupun kultural—mampu mengarahkan keputusan kolektif, memperkuat dominasi, dan mengakses sumber daya politik maupun ekonomi.

2. Modal Budaya (Cultural Capital)

Modal budaya merujuk pada nilai, pengetahuan, keterampilan, simbol, dan kebiasaan yang dihargai oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Modal ini hadir dalam tiga bentuk:

Inkorporasi (embodied): misalnya cara berbicara, cara berpikir, pengetahuan lokal.

Objektifikasi (objectified): seperti buku, artefak budaya, benda simbolik.

Institusionalisasi (institutionalized): seperti gelar akademik atau pengakuan adat.

Modal budaya memiliki pengaruh besar dalam pembentukan otoritas moral dan intelektual, karena mereka yang menguasainya sering dianggap lebih pantas memimpin atau diikuti, bahkan tanpa legitimasi hukum formal.

3. Modal Simbolik (Symbolic Capital)

Modal simbolik adalah bentuk modal sosial atau budaya yang telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi dalam tatanan sosial. Modal ini mewujud dalam kehormatan, nama baik, reputasi, atau wibawa. Menurut Bourdieu, modal simbolik adalah bentuk kekuasaan paling halus dan efektif, karena bekerja secara tak kasat mata: ia diterima sebagai sesuatu yang “alamiah”, “pantas”, atau “suci”. Dengan kekuasaan simbolik, seorang aktor tidak perlu memaksakan kehendak secara langsung—masyarakat dengan sendirinya tunduk karena meyakini otoritas tersebut sah. “Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan untuk membuat dunia sosial terlihat dan dipercaya, membentuk persepsi dan definisi tentang realitas” (Bourdieu, 1991).

4. Hubungan antar Modal: Konversi dan Reproduksi Kekuasaan

Ketiga jenis modal ini saling terhubung dan dapat dikonversi satu sama lain. Misalnya:

Modal budaya dapat dikonversi menjadi modal simbolik (pengetahuan adat → wibawa spiritual).

Modal sosial dapat menghasilkan modal simbolik (jaringan sosial → pengakuan moral).

Modal simbolik dapat memperkuat modal lainnya (wibawa → pengaruh politik).

Bourdieu juga menekankan bahwa modal-modal ini digunakan untuk mereproduksi dominasi sosial. Artinya, aktor yang memiliki modal tertentu akan terus mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka melalui mekanisme yang tampak “wajar”, padahal sarat dengan strategi kekuasaan yang tersembunyi.

5. Relevansi untuk Studi Politik dan Sosial

Dalam konteks masyarakat tradisional maupun kontemporer, konsep kekuasaan ala Bourdieu sangat berguna untuk memahami: Bagaimana legitimasi terbentuk bukan hanya dari hukum atau kekuatan, tetapi dari simbol dan nilai. Mengapa sebagian besar masyarakat mematuhi otoritas tertentu tanpa dipaksa. Bagaimana kekuasaan dapat diwariskan dan dilanggengkan secara halus melalui nilai budaya dan jaringan sosial.

Khusus dalam studi komunitas adat seperti Tolotang, teori Bourdieu memberi alat analisis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana pemimpin adat (seperti Uwa) mengelola modal-modal ini untuk membentuk dan mengarahkan perilaku kolektif, termasuk dalam urusan politik dan preferensi memilih.

Teori kekuasaan Pierre Bourdieu mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari lembaga resmi, tetapi juga dari relasi sosial, penguasaan budaya, dan pengakuan simbolik. Kekuasaan menjadi efektif ketika dijalankan bukan melalui paksaan, melainkan melalui

kepercayaan dan persepsi yang dibentuk secara kolektif. Dengan demikian, pemahaman atas modal sosial, budaya, dan simbolik memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk mengkaji dinamika kekuasaan di masyarakat—termasuk dalam komunitas adat yang tampaknya “tertutup”, tetapi justru menyimpan logika kekuasaan yang kompleks dan terstruktur.

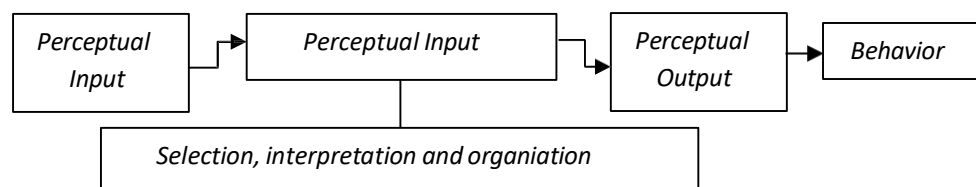
1.7 Definisi Konsepsional

1.7.1 Preferensi Memilih

Preferensi memilih menjelaskan bagaimana terbentuknya pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang terhadap perilaku memilih seseorang kepada partai atau calon legislatif tertentu. Preferensi memilih merupakan sesuatu yang berbentuk sebuah persepsi (abstrak) yang ada didalam benak seseorang dari persepsi ini yang kemudian diwujudkan dengan perilaku memilih seseorang. Menurut Heywood (**ibid**) Pengaruh jangka pendek dapat mempengaruhi pilihan seseorang seperti personalitas dalam partai politik melalui bantuan media massa yang berfungsi mengekspos pimpinan partai sebagai simbol partai tersebut. Sedangkan perilaku atau preferensi memilih seseorang yang dipengaruhi oleh pengaruh jangka panjang salah satunya adalah sosialisasi atas partai atau calon legislatif tertentu dalam lingkup keluarga.

Peter Bryant mengemukakan bahwa: “Persepsi seseorang ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakini dengan hal-hal yang diharapkan. Semakin kecil jarak (gap) antara keduanya, akan semakin baik persepsi seseorang terhadap satu fenomena. Karena itu, persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, latar belakang sosial-budaya, motivasi, dan suasana hati (**Unwir.**) (**Aminudin., 2011**) Fremond E. Kast dan J.E. Rozenwigh mengatakan: “Persepsi sangat menentukan sikap seseorang. Melalui persepsi yang berfungsi sebagai filter (saringan), seseorang membangun kepercayaan dan motivasi terhadap satu stimulus (dalam hal ini fenomena sosial), yang kemudian menentukan perilaku seseorang. (**ibid**) Peran sentral persepsi dalam membentuk atau menentukan tingkah laku seseorang, digambarkan dalam satu diagram oleh Chung dan Megginson. (**ibid**)

Gambar 2.1 Hubungan Presepsi dan Tingkah laku



Sumber: Samuel J. Elderveld dalam Suryana Aminudin. *Perilaku Politik di Indonesia*. (Jurnal Aspirasi Vol 1. No.2 Febuari 2011. Indramayu. Fisip Unwir.

Lebih lanjut Imawan (**Unwir. R. I., 2011**) mengemukakan bahwa: “*Perceptual input*” disini pada dasarnya berupa rangsangan (stimulus) yang datang dari luar diri seseorang. Stimulus yang masuk, akan diolah dulu dalam satu proses yang disebut “Perceptual Mechanism”. Dalam proses ini terjadi proses yang lebih kecil lagi, yakni seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap stimulus yang ada. Dalam proses inilah berperan pengalaman serta norma- norma kemasyarakatan yang

diyakini seseorang. Produk dari "Perceptual Mechanism" itu dapat berwujud sikap, opini, ataupun perasaan terhadap stimulus; yang akhirnya akan menentukan tingkah laku seseorang.

Perilaku pemilih Pemilu legislatif dalam secara langsung dapat dijelaskan sebagai berikut: Masuknya rangsangan-rangsangan (stimulus) yang datang dari luar seorang pemilih. Rangsangan tersebut bias berupa pengalaman memilih dalam Pilkada atau Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara langsung; pengaruh kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan lain-lain. Rangsangan tersebut, kemudian diolah dalam suatu proses yang disebut Perceptual Mechanism, dari seleksi yang masuk kedalam pikiran pemilih, pemilih akan menginterpretasikan setiap alternatif - alternatif pilihan.

Dari seleksi dan interpretasi tersebut, akan diorganisasikan dalam pikiran pemilih, dan dalam proses ini akan berperan pula faktor-faktor lain seperti pengalaman pemilihan nilai-nilai atau norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dan diyakini tidak bertentangan dengan keyakinan pemilih. Produk dari Perceptual Mechanism berupa sikap mendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, opini yang berkembang di masyarakat (seperti apakah pasangan calon tersebut baik atau tidak baik?), perasaan pemilih terhadap pasangan calon (suka atau tidak suka?), yang mana semua itu, akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Preferensi memilih masyarakat etnis Tolotang dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kab sidrap dijelaskan melalui beberapa model pendekatan yaitu: pertama, model sosiologis dengan variabel sentiment etnis, model ini di dasarkan pada realitas perilaku memilih bukan merupakan realitas pembuatan keputusan politik secara individu melaikan sebagai suatu realitas kelompok. Keputusan para pemilih lebih tepat dilukiskan sebagai keputusan kelompok atau dipengaruhi oleh subkultur (cultural tastes) dan atribut sosial daripada pilihan politik individu.

Kedua, model pendekatan psikologis dengan variabel identifikasi uwa (tokoh masyarakat adat). Model ini didasarkan pada melekatnya perasan psikologis seseorang terhadap tokoh adat (uwa). Para pemilih melihat sebagai seseorang yang mengidentifikasikan uwa sebagai panutan pilihannya Seseorang memilih karena merupakan simpatisan uwa bukan karena pertimbangan faktor lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dan lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian ini:

1. Thesis yang ditulis Nursam dengan judul thesis

“Praktek Kewargaan Masyarakat Adat Tolotang Dalam Mengakses Pelayanan Dasar Pemerintah Di Kabupaten Sidrap”

Masyarakat adat Tolotang merupakan salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan kepercayaan dan budaya mereka yaitu kepercayaan terhadap Dewata Suae. Masyarakat adat Tolotang adalah masyarakat yang juga merupakan masyarakat adat yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai intervensi abik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat salah satunya adalah negara yang mengafiliasikan mereka kedalam salah satu agama dari enam agama resmi yang diakui negara. Terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini: pertama, melacak praktek kewargaan masyarakat adat Tolotang dalam mengakses layanan dasar. Kedua, melihat sejauh apa identitas yang diberikan mempengaruhi akses terhadap memperoleh layanan dasar pemerintah. Ketiga, mengeksplorasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dasar pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlangsung selama tiga bulan dengan periode waktu April – Juni 2021, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan berpartisipasi dan berbaur langsung dengan masyarakat Adat dengan melibatkan diri secara langsung (live-in). penelitian ini menemukan bahwa praktik kewargaan masyarakat adat Tolotang dalam mengakses pelayanan publik banyak dipengaruhi oleh kebijakan orde baru yang menjadikan mereka sebagai bagian dari agama Hindu hal ini tentu berpengaruh pada proses pelayanan dasar pemerintah seperti pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum nasional keagamaan pada sekolah-sekolah di Amparita berdampak langsung pada siswa-siswi karena mereka harus mempelajari pelajaran yang bukan merupakan keyakinan agama mereka, selain itu penelitian ini menemukan selain faktor regulasi negara ini juga dating dari faktor internal masyarakat adat Tolotang, pertama lembaga adat tidak terlalu bersifat mengingat misalnya tidak ada jadwal tetap untuk proses transformasi keilmuan. Kedua, tidak ada regenerasi tenaga pengajar khusus, ketiga, tidak ada kitab suci yang bisa dijadikan acuan dalam pelajaran sehingga hanya bisa dilakukan secara lisan hal ini berdampak pada masyarakat adat yang tidak bisa melakukan proses negosiasi pada negara terkait ketimpangan dalam bidang pendidikan. Temuan lain dari penelitian ini adalah temuan positif dalam bidang kesehatan dimana masyarakat adat telah memperoleh pelayanan penuh dan membuktikan bahwa negara memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat adat karena identitas yang diberikan sudah memenuhi syarat

dalam pencatatan sipil dan tidak bersentuhan langsung dengan status agama yang mereka yakini.

2. Skripsi yang ditulis Nursam yang berjudul

Kekuatan Politik Pemimpin Adat Uwa' Tolotang Pada Pemilihan Kepala Daerah Sidrap Tahun 2013,

menguraikan Uwa' telah diberikan legitimasi oleh masyarakat Tolotang, sehingga apapun yang dikatakan oleh Uwa' memiliki legitimasi secara religius maupun legitimasi secara eliter, sehingga Uwa' sangat memiliki peranyang sentral dalam kehidupan masyarakat Tolotang. Pengaruh Pemimpin Adat Uwa' pada masyarakat Tolotang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2013, tentunya sangat besar, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Peranan uwa sebagai pemimpin adat memberikan kekuasaan penuh kepada Uwa' pada masyarakat Tolotang. Kekuasaan yang ia miliki secara langsung menghasilkan kepatuhan penuh masyarakat terhadapnya. Kepatuhan masyarakat terhadap Uwa' menjadikannya sebagai elit penentu dalam kehidupan masyarakat Amparita. Posisi Uwa' sebagai pemimpin Adat Masyarakat Tolotang, posisi uwa sebagai pemimpin adat, Uwa tergolong sebagai pemimpin paternalistik, yang disebabkan pemimpin (Uwa') diibaratkan sebagai bapak/ibu sedangkan bawahan (masyarakat Tolotang) adalah anak, sehingga dalam paradigma paternalistik bapak/ibu (pemimpin) memiliki tanggung jawab untuk menaungi sang anak. Di sisi lain, Legitimasi yang diperoleh Uwa' berasal dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Uwa' berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat Tolotang yakni, kitab yang digunakan oleh suku to lotang yaitu lontara atau Sure Galigo. Proses Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Sidrap, membawa peran serta pemimpin adat di masyarakat Amparita. Hal tersebut disebabkan karena Uwa' memiliki kapasitas dalam membentuk karakter memilih masyarakat. Peranan tokoh masyarakat tersebut kemudian menjadi perhatian elit-elit politik guna sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap pemilihan umum, karena sosok seorang pemimpin adat merupakan sosok yang bisa di dengar oleh masyarakat Tolotang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Alfiansyah, Mahmud Tang, safriadi pada 2018 yang berjudul

"Perilaku Politik Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang",

menguraikan terkait peran pemangku adat yang sangat berpengaruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat Tolotang. Uwa dalam hal ini sangat menentukan sebuah keputusan yang akan diambil secara kelompok yang ada di Tolotang, dan pengambilan keputusan juga berdasarkan wilayah-wilayah tertentu yang ada di daerah Tolotang berdasarkan wilayah pemangkuannya masing-masing.

4. Jurnal yang ditulis Dr.Drs.Andi Rusdi Maidin,S.H., M.Si Pada 2017 yang berjudul

“Model Kepemimpinan Uwatta Dalam Komunitas Tolotang Benteng” .

Sebuah konflik peradaban yang terjadi antara Bugis versus Islam di kerajaan Sidenreng, namun dengan kearifan lokal (lokal jenius) yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin mereka antara addaawang La Patoroi dengan para pemimpin Uwa (kepercayaan Toriolota) mampu menyelesaikan konflik itu dengan baik, di ibaratkan menarik sehelai rambut, rambutnya tidak putus dan tepungnya pun tidak berserakan,yaitu sebuah konsensus kerajaan.

Berangkat dari penjelasan tabel diatas,maka penulis melihat adanya perbedaan yang ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada pemanfaatan Nilai Sajauh Mana Peran Uwa Dalam membentuk presepsi Politik Bagi Kelompok Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidendeng Rappang yang kemudian menjadi temuan pada thesis ini dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab V (lima).

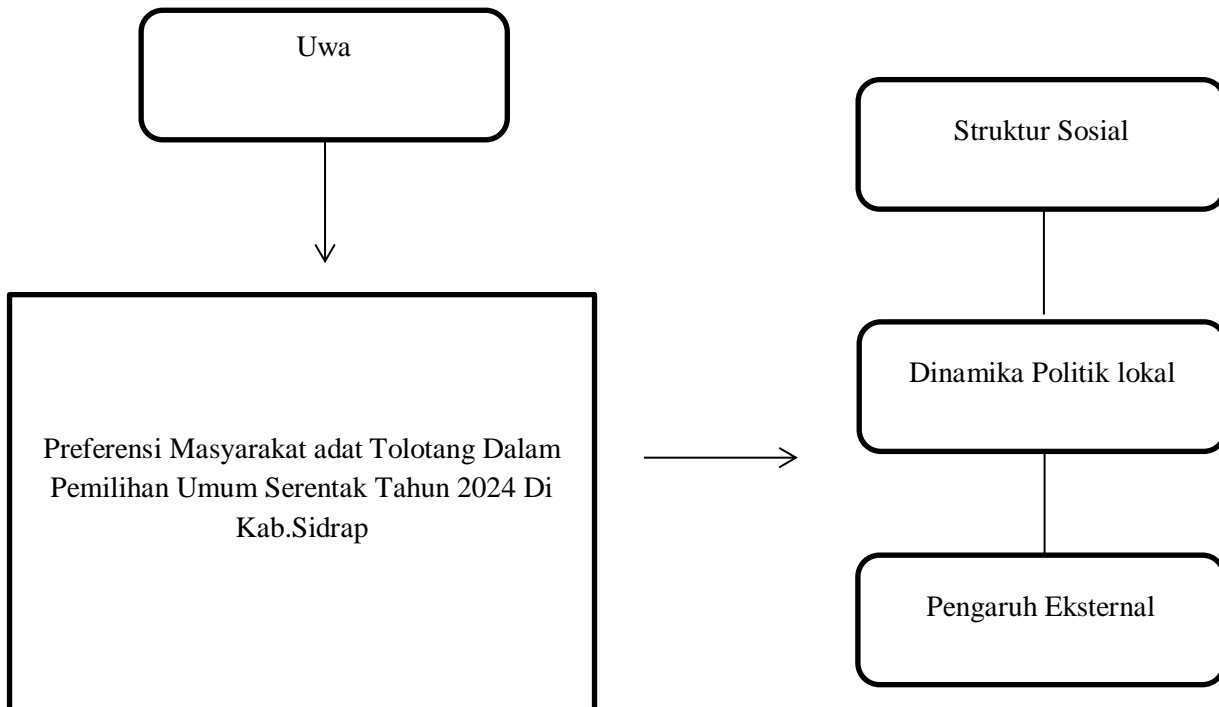
2.3 Kerangka pemikiran

Dalam kelompok masyarakat adat Tolotang, terdapat seorang tokoh yang dihormati dan dianggap sebagai penjaga kearifan lokal, yaitu Uwa. Uwa memiliki peran penting dalam memutuskan arah politik bagi kelompok masyarakat adat Tolotang. Bagi mereka, Uwa adalah sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai tradisional dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan zaman.Setiap kali masyarakat Tolotang dihadapkan pada keputusan politik, mereka mengumpulkan diri di bawah pohon beringin tua tempat Uwa biasanya berada. Di sinilah mereka mendengarkan nasihat dan petuah Uwa. Uwa tidak hanya mempertimbangkan kepentingan saat ini, tetapi juga memandang jauh ke masa depan, mempertimbangkan dampak keputusan politik terhadap ekosistem mereka dan generasi yang akan datang.

Nilai-nilai yang diajarkan oleh Uwa sangatlah dalam memutuskan arah politik. Pertama, keberlanjutan alam menjadi prioritas utama. Uwa mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam, menjaga hutan dan sungai agar tetap lestari untuk keberlangsungan hidup mereka. Kedua, solidaritas dan persatuan di antara masyarakat Tolotang. Uwa percaya bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat menghadapi tantangan dari luar tanpa mengorbankan identitas dan kebudayaan mereka.

Melalui pertimbangan yang cermat dan berlandaskan pada nilai-nilai tradisional, Uwa memandu masyarakat Tolotang dalam mengambil keputusan politik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keputusan-keputusan ini tidak hanya memengaruhi kehidupan mereka saat ini, tetapi juga membentuk fondasi untuk masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan Uwa sebagai panduan mereka, masyarakat Tolotang terus memelihara warisan budaya mereka sambil menghadapi dinamika dunia modern.

2.3.1 Skema Pemikiran



BAB II

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry dengan penekanan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik secara deskripsi. Maka dengan demikian secara sederhana penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap satu peristiwa atau fenomena yang berlangsung selama proses penelitian dari awal sampai akhir yang bersifat alami dan holistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena terkait dengan subjek penelitian. Dipilihnya penelitian kualitatif deskriptif dalam penulisan ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yakni mampu menguraikan, menjelaskan dan mendeskripsikan Patrimonialisme uwa dalam menentukan arah dukungan politik dalam menjaga eksistensi masyarakat adat tolotang di kecamatan amparita kab sidrap

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten sidenreng rapping provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini akan berfokus di Kecamatan amparita yang mayoritas dihuni oleh kelompok masyarakat adat Tolotang dan beberapa kecamatan yang ada di daerah sidenreng rapping. Kemudian peneliti melakukan wawancara Kembali sekaligus melakukan focus group diskusi (FGD) dengan beberapa tokoh masyarakat, uwa, dan tokoh agama yang berada di lingkungan kecamatan amparita.

3.3 Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh dan juga menunjukkan asal informasi. Sumber data yang menjadi subjek penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Iqbal Hasan sumber data terbagi sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian baik melalui wawancara maupun observasi yang berbentuk lisan dan tindakan dari subjek kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder jenis data tambahan yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari subjek atau dapat diperoleh dari dokumen serta dokumentasi yang diambil selama penelitian. Sumber data sekunder biasanya diperoleh dari tulisan- tulisan yang diarsipkan terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua bentuk dalam penentuan informan yaitu purposive dan snowball.

Pada penelitian akan digunakan teknik snowball dalam menentukan informan penelitian sebagai sumber data primer. Snowball merupakan cara memilih sumber informasi mulai dari satu informan kemudian makin lama – makin membesar. Oleh karena itu informan kunci ditentukan terlebih dahulu kemudian dari informan kunci selanjutnya memunculkan informan lain yang mengetahui dan memahami suatu fenomena sehubungan dengan informasi yang dijadikan fokus penelitian yang disesuaikan dengan lokasi penelitian. Proses pengumpulan data pada penelitian ini

dianggap selesai oleh penulis setelah menemukan jawaban yang dianggap telah menjawab Batasan rumusan masalah penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini dibagi berdasarkan uwa itu sendiri, uwa dan masyarakat tolotang hal ini bertujuan untuk mengurangi pandangan subjektivitas dalam penelitian serta mempermudah dalam penentuan informan selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan kunci tersebut selanjutnya dapat ditemukan beberapa informan untuk memberikan informasi terkait tema penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Wawancara merupakan salah satu proses interaksi antara si peneliti dan informan sebagai sumber informasi melalui komunikasi langsung atau wawancara, dapat pula dikatakan sebagai percakapan tatap muka (face to face)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai informan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Adapun yang menjadi informan adalah:

Tabel 3.1. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Alasan
1	Uwa Sunarto dan uwa jappi	Untuk Mengetahui strategi dan langkah yang diambil uwa sunarto dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat adat Tolotang di pilpres taun 2024
2	Komunitas Masyarakat Adat Tolotang	Untuk mengetahui pola pergerakan masyarakat adat tolotang dalam memenangkan pemilihan presiden tahun 2024

2. Observasi

Observasi adalah cara memilih sumber informasi mulai dari satu informan kemudian makin lama – makin membesar. Oleh karena itu informan kunci ditentukan terlebih dahulu kemudian dari informan kunci selanjutnya memunculkan informan lain yang mengetahui dan memahami suatu fenomena sehubungan dengan informasi yang dijadikan fokus penelitian yang disesuaikan dengan lokasi penelitian. realitas yang sedang terjadi dalam objek penelitian. Berdasarkan pengamatan penelitian inilah kemudian peneliti menarik dan memberikan makna akan realitas yang terjadi secara natural.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang yang sudah berlalu atau terjadi. Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini bisa saja terkait dengan sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai atau terkait dengan fokus penelitian. Dokumen dalam penelitian ini sangat membantu peneliti untuk memberikan gambaran akan realitas dalam menjawab fenomena yang diteliti. Dokumen biasanya dapat berbentuk teks, sejarah, karya tulis, biografi seseorang, karya tulis bahkan gambar atau situs yang merupakan karya seni

Berdasarkan uraian dari tiga metode dalam pengumpulan data diatas maka pada tulisan ini mengutamakan penggunaan wawancara (interview). Hal ini didasarkan atas pertimbangan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan detail tentang objek yang diteliti namun tidak mengabaikan proses observasi dan keberadaan dokumen pendukung lainnya. Dikarenakan informasi yang didapatkan bisa lebih banyak dan pertanyaan memungkinkan untuk didalami dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemilihan dan penyusunan data yang dilakukan oleh peneliti sejak proses penelitian dimulai. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dijelaskan oleh Mules dan Huberman.

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terkumpul dari hasil wawancara maupun bersumber dari hasil catatan lapangan. Pada dasarnya proses reduksi data dilakukan semenjak proses penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan oleh penulis pada saat masih berada di lokasi penelitian. yaitu di kecamatan amparita dengan pertimbangan penulis akan mudah untuk melakukan wawancara Kembali dengan informan apabila masih membutuhkan data dari informan. Pada saat melakukan reduksi data penulis mendengarkan rekaman hasil wawancara dari informan serta memperbaiki hasil catatan dari jawaban – jawaban informan. Pemfokusan dan penyederhanaan data dilakukan agar mempermudah penulis dalam menentukan data yang akan digunakan dalam menemukan jawaban atas tema penelitian ini. Sehingga dari sekian banyak informasi yang didapatkan penulis dilapangan hanya beberapa saja yang ambil oleh

penulis setelah dilakukan pemfokusan dan penyederhanaan data. Hal ini dikarenakan informasi yang lain tidak sesuai dengan tema penelitian. **(Ibid)**

2.Data Display

Data Display merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks naratif, dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau. Berdasarkan uraian diatas pada tahap ini penulis telah Menyusun argument temuan penelitian terkait dengan power uwa dalam menentukan arah dukungan politik dalam menjaga eksistensi masyarakat adat tolong di kec amparita kab sidrap.

3.Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada tahap ini, peneliti telah memberikan makna dari data yang didapatkan dari hasil wawancara. Penarikan kesimpulan dilakukan pada penelitian ini setelah Melewati tahapan reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan melakukan proses verifikasi Kembali hal ini bertujuan untuk mengurangi bias dan dan subjektivitas peneliti. Tahapan – tahapan yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penarikan kesimpulan yaitu membaca dan memeriksa Kembali seluruh tulisan. Pada penelitian ini mulai dari halaman pertama sampai terakhir untuk memastikan bahwa penarikan kesimpulan itu sudah sesuai dengan tema dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi Kembali kepada dosen pembimbing penulis penarikan kesimpulan.